

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 190/PM.00.01/K.MU/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, POLRI BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Maluku Utara dalam melaksanakan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diperlukan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU

:

Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA

:

Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan hasil pengawasan Netralitas ASN, melaksanakan pengawasan di lapangan serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 190/PM.00.01/K.MU/08/2024
TANGGAL : 01 Agustus 2024

SUSUNAN KELOMOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Pokja
1	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Rusly Saraha, S.E., M.AP.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
3	Suleman Patras, S.Sos.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. SDM, Organisasi, dan Diklat	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
4	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
5	Drs. John A. Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
6	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Subkoor Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
7	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
8	Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Analisis Pemilihan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
9	Sri Abdurahman, S.E.	Analisis Kebijakan	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
10	Yenny Sofyan, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
11	Nessa Shabina R. Silayar	PPNPNS	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
12	Ikram M Saleh, SH., MH.	Pemeriksa Pidana Khusus pada Asisten Pengawasan	Kejati Provinsi Maluku Utara	Anggota
13	Yafet Ohello, SH., MH.	Pemeriksa Intelijen pada Asisten Pengawasan	Kejati Provinsi Maluku Utara	Anggota
14	Fatah F Adam, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kesbangpol Provinsi Maluku Utara	Anggota

15	Ridwan Djalal, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kesbangpol Provinsi Maluku Utara	Anggota
16	Syam Sofyan, S.Sos.	Sekretaris BKD	BKD Provinsi Maluku	Anggota
17	Al Husen Albaar, S.STP.	Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	BKD Provinsi Maluku	Anggota
18	Asrul Gandhi, S.STP., M.Si.	Inspektur Pembantu II	Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Anggota
19	Fadila Buamona, S.STP.	Auditor Pertama	Inspektorat Provinsi Maluku Utara	Anggota
20	Serka Apri		Korem 152/Baabullah	Anggota
21	Serka Zumar		Korem 152/Baabullah	Anggota
22	Utul Sahbudin	Bamin Unit 2 Subbid Paminal	POLDA Maluku Utara	Anggota
23	Hairudin, S.H	Kaur Anev Sub. Dumasani Itwasda	POLDA Maluku Utara	Anggota
24	Mayor Laut (P) Sunardi	Pasintel	LANAL Ternate	Anggota
25	Sertu Keu William Manaek Simamora	Anggota 1 Sub Unit Intel	LANAL Ternate	Anggota

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.